

## TINJAUAN YURIDIS TENTANG KEDUDUKAN DAN PENGATURAN KUASA WAJIB PAJAK DALAM PEMENUHAN HAK DAN PELAKSANAAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN DI INDONESIA

### INTISARI

Oleh:

Suci Damayanti,<sup>1</sup> Fadhilatul Hikmah, S.H., LL.M.<sup>2</sup>

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan kedudukan dan pengaturan Kuasa Wajib Pajak di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang bersifat eksploratif yaitu menemukan dan menggali informasi terkait masalah yang sedang dibahas. Data-data yang diperoleh adalah hasil dari studi pustaka dan wawancara dengan narasumber yang disusun secara sistematis. Terhadap hasil penelitian dan pembahasan dalam penulisan hukum ini diperoleh kesimpulan seorang Kuasa Wajib Pajak tidak lagi terbatas pada Konsultan Pajak dan Karyawan Wajib Pajak, akan tetapi terbuka bagi semua profesi sepanjang memenuhi persyaratan teknis-administrasi perpajakan. Seorang Kuasa hanya dapat melakukan pemenuhan hak dan pelaksanaan kewajiban perpajakan Wajib Pajak di luar proses Pengadilan Pajak dengan menggunakan surat kuasa khusus.

**Kata Kunci:** Kedudukan, Pengaturan, Kuasa Wajib Pajak, Hak dan Kewajiban

---

<sup>1</sup>Mahasiswa Program Studi S1 Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. (damayantisuci19@gmail.com)

<sup>2</sup>Dosen Program Studi S1 Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. (fhikmah@mail.ugm.ac.id)

**LEGAL ANALYSUS ON TAXPAYER'S REPRESENTATION POSITION  
AND REGULATION IN ENFORCING TAXPAYER'S  
RIGHTS AND OBLIGATION IN INDONESIA**

***ABSTRACT***

By:

Suci Damayanti, Fadhilatul Hikmah<sup>3</sup>, S.H., LL.M.<sup>4</sup>

The purpose of this research is to explain position and regulation of taxpayer's representation in Indonesia. This research using normative law research method and the character is explorative by looking and delving information everything related to the research result. The data that contained from the library research result and by the interview result and then arranged sistematically. Against the results of research and discussion in this legal writing, obtained conclusion that the taxpayer's representation is not just limited by tax consultant and taxpayer employees but also opened for every profession as long as fulfill taxation technical-administration qualification. The taxpayer's representation can only fulfill right's and obligation outside of tax court process base on specifically authority letter.

**Keyword:** Position, Regulation, Taxpayer's Representation, Right's and Obligation

---

<sup>3</sup>Undergraduate Law Student, Faculty of Law Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, (damayantisuci19@gmail.com)

<sup>4</sup>Lecturer at Faculty of Law Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, (fhikmah@mail.ugm.ac.id)